

PRETEST PERTEMUAN KE 5

NAMA : PUTRI ARISNA

NPM : 2213053242

KELAS : 2B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

JAWAB:

Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut yaitu dapat mengetahui tentang permasalahan yang terdapat pada UU Cipta Kerja rupanya membuat sekelompok masyarakat mengajukan aspirasi yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, para masyarakat melakukan demonstrasi dengan tujuan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari pernyataan tersebut saya dapat memahami jangan takut untuk mengajukan aspirasi demi melindungi konstitusi Indonesia.

- Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai artikel tersebut yaitu semestinya UU Cipta Kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Indonesia menganut system demokrasi dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, Seharusnya pemerintah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas lebih mengedepankan kepentingan masyarakat nya demi kesejahteraan bersama.
- Seharusnya konstitusi negara Indonesia bahkan dimuat kewajiban negara untuk:
 - Melindungi, memajukan, dan menegakan hak asasi manusia.
 - Kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan anak telantar.
 - Kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan.
 - Kewajiban lainnya untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

JAWAB:

Hakikat Konstitusi adalah konsep dan peraturan yang membatasi kekuasaan pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan UUD 1945 dan memberi jaminan bagi warga negaranya.

Pentingnya Konstitusi bagi suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang supaya menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak-hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah.

Kedudukan dan fungsi konstitusi yang dirumuskan Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yaitu:

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate of new state). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.

- UUD NRI menepati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normative, Undang-Undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu Undang-Undang isinya bertentangan dengan UUD maka dapat menimbulkan masalah konstiusionalitas Undang-Undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstiusionalitas suatu Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstiusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

JAWAB:

Contohnya perilaku pejabat negara yang tidak konstiusional ialah:

1. Korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintah
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti perlakuan buruk atau tidak adil terhadap masyarakat kalangan bawah.
3. Manipulasi pemilu atau pemilihan secara tidak fair.

Para Pejabat yang melakukan perilaku tidak konstiusional seperti itu merugikan masyarakat negara dan perekonomian negara, Mereka yang berbuat seperti itu seharusnya mendapatkan hukuman yang berat, setimpal dengan perbuatan nya supaya mereka jera dan tidak mengulangi kesalahan nya lagi. Sanksi yang diberi bisa berupa sanksi pidana penjara juga sanksi mati jika pejabat tersebut semena-mena dengan Hak Asasi Manusia, Hal ini supaya pejabat lainnya takut akan hukum di Indonesia dan tidak melakukan hal seperti itu lagi.